

ABSTRAK

Internet merupakan inovasi baru yang mempengaruhi sektor kehidupan manusia. internet tidak hanya memberikan dampak positif tetapi juga memiliki dampak negatif, salah satunya adalah penyebaran pornografi. Dalam proses penyebaran pornografi tersebut terdapat juga pihak yang menjadikan pornografi sebagai bahan yang di transaksikan yaitu transaksi jual beli. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengatur terkait penyebaran pornografi, tetapi karena transaksi pornografi yang memiliki banyak proses seperti penawaran, kesepakatan, penyerahan barang, dan pembayaran serta bentuk pengaturan yang sangat luas membuat terdapat banyak peraturan perundang-undangan yang dapat diterapkan. Hal ini membuat ketidak pastian hukum. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Kualifikasi tindak pidana terkait transaksi jualbeli pornografi di media internet dan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana dalam transaksi jualbeli pornografi di media internet. Metode penelitian yang digunakan adalah legal research dengan melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual untuk mengkaji permasalahan hukum yang ada. Hasil dari penelitian tersebut dapat diketahui bahwa transaksi jual beli pornografi melalui internet dapat diterapkan Undang-Undang ITE dan Pornografi . kemudian pertanggungjawabannya tergantung dari pembuktian dalam proses pembuktian di dalam persidangan apakah bentuk dari pornografi tersebut. Undang-Undang ITE hanya dapat digunakan jika bentuk pornografi adalah dokumen atau informasi elektronik dan disebarkan dengan menggunakan sistem elektronik.

Kata Kunci: pertanggungjawaban pidana, transaksi, jualbeli, pornografi, internet

ABSTRACT

The Internet is a new innovation that affects sectors of human life. The internet not only has a positive impact but also has a negative impact, one of which is the dissemination of pornography. In the process of disseminating pornography, there are also parties who make pornography a transacted material, namely sale and purchase transactions. The laws and regulations in Indonesia have guided the dissemination of pornography, but because pornographic transactions have many processes such as bidding, agreement, delivery of goods, and payment as well as very broad forms of regulation, there are many laws that can be applied. This creates legal uncertainty. The formulation of the problem in this study is the qualification of criminal acts related to pornography selling and buying transactions on the internet media and the liability for criminal acts in pornographic julabeli transactions on the internet media. The research method used is legal research with regulatory control to study existing legal problems and conceptual approach. The results of this study show that the pornography sale and purchase transaction via the internet can be applied to the ITE and pornography laws. Then the responsibility depends on the evidence in the process of proving in court what the form of pornography is. The ITE Law can only be used if the pornographic form is an electronic document or information and is disseminated using an electronic system.

Keywords: criminal liability, transactions, buying and selling, pornography